



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3849605 FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.depkeu.go.id

KETERANGAN PERS

Menkeu Optimis Indonesia Terhindar dari *Middle Income Trap*

Denpasar, 12 Desember 2013 – Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dewasa ini, salah satu implikasi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah terjadinya peningkatan potensi risiko untuk masuk ke dalam perangkap negara kelas menengah (*middle income trap*). Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia.

Dalam Seminar Internasional mengenai *Middle Income Trap* yang diselenggarakan tripartit Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menjelaskan bahwa *middle income trap* adalah suatu kondisi mengenai perkembangan ekonomi dimana suatu negara yang sudah berhasil masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah (*middle income countries*), namun kemudian mengalami stagnasi dalam jangka waktu cukup lama dan tidak berhasil naik ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. Jika merujuk pada standar internasional, maka durasi waktu suatu negara bisa dikatakan terperangkap dalam jebakan kelas menengah adalah sekitar 42 tahun.

Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa saat ini Indonesia belum tergolong pada negara yang masuk ke dalam jebakan kelas menengah. Indonesia pada saat ini berada dalam status sebagai negara kelas menengah dengan pendapatan per kapita sekitar US\$5.170 (standar harga internasional PPP 1990). Indonesia telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah pada awal tahun 1990-an. Dengan demikian, peluang terhindar dari *middle income trap* masih cukup besar.

Menteri Chatib menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk naik kelas ke kelompok negara berpendapatan tinggi. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor seperti Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar baik berupa kekayaan alam maupun jumlah penduduk yang besar mencapai 250 juta orang. Bahkan, secara demografi struktur penduduk di Indonesia didominasi oleh kelompok produktif yang sangat menguntungkan bagi perekonomian nasional dan fenomena ini dikenal sebagai bonus demografi. Selain itu, kinerja ekonomi makro kita cukup baik.

Namun demikian, tidak mudah memang untuk melakukan lompatan dari kelompok kelas menengah kepada kelompok berpenghasilan tinggi. Studi Bank Dunia bahkan menunjukkan bahwa negara yang terperangkap ke dalam jebakan kelas menengah jauh lebih banyak dibandingkan negara yang mampu naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Menkeu Chatib menambahkan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk bisa melakukan lompatan menjadi negara berpenghasilan tinggi. Secara

eksternal beberapa tantangan tersebut adalah ketidakpastian global dan tingginya volatilitas harga minyak. Sementara, dari sisi domestik, beberapa tantangan yang dihadapi adalah perlambatan produktivitas ekonomi, tren penurunan produksi minyak, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta adanya peningkatan *inequality*.

Menurut Menkeu Chatib, beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk naik kelas ke kelompok negara berpendapatan tinggi diantaranya: pertumbuhan ekonomi haruslah berkelanjutan sekaligus inklusif. Pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable*) haruslah didukung dengan meingkatnya produktifitas yang ditunjang oleh peningkatan kualitas SDM, pengelolaan SDA yang baik untuk penciptaan nilai tambah tinggi di dalam negeri, pengembangan teknologi dan inovasi serta tentunya dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Pendek kata ada proses transformasi industrialisasi secara gradual ke arah industri berbasis nilai tambah tinggi. Sementara itu, pertumbuhan yang inklusif diarahkan agar kemajuan ekonomi haruslah juga dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan.

--ooOoo--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Tel : 021-3808391
Fax : 021-3810181